

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Pencegahnya Adalah Protokoler Kesehatan

ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak, menilai rencana Pemprov DKI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di tingkat RW tidak tepat. Menurutnya, protokol kesehatan sejatinya tetap harus diberlakukan di setiap RT/RW.

"Rencana pemprov DKI untuk lebih fokus dalam pengawasan di 62 RW yang dikelompokkan zona merah tidak tepat. Seharusnya seluruh RW di DKI Jakarta harus menjadi perhatian," kata Jhonny. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, yang penting dilakukan Pemprov DKI saat ini adalah sosialisasi secara masif dan penegakan aturan terhadap protokol kesehatan.

Jhonny menyatakan pelanggaran PSBB di Jakarta sudah seharusnya dilaksanakan Juni 2020. Menurutnya, sudah saatnya perekonomian digerakkan. Tetapi protokol kesehatan juga harus

semakin diperketat dan ditegakkan.

"Penegakan aturan protokol kesehatan ini juga diseluruh tempat seperti pasar, mal, pabrik, dan sebagainya," ujarnya. Johnny Simanjuntak menyebut, cara mencegah pandemi Covid-19 ialah lewat membudayakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Pembatasan yang hanya berlaku untuk 62 RW zona merah di DKI Jakarta dinilai kurang relevan.

"Pola penularan itu kan hampir di semua RW. Di tempat kerumunan seperti pasar, kantor, pabrik, juga potensial (terjadi penularan). Pemprov DKI sebenarnya harus perhatikan ke sana," ucap Johnny.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya berencana menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) tingkat RT/RW. Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi dan budaya protokol pencegahan Covid-19.

"Seperti pakai masker, physical distancing, cuci tangan, dan hindari kerumunan kalau tidak penting," ujar Johnny. Pemprov DKI intensif menyosialisasikan aturan era kenormalan baru (new normal) dengan memanfaatkan toa peringatakan banjir. Sosialisasi juga dapat dilakukan di rumah-rumah ibadah.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI itu juga meminta Pemprov DKI lebih ketat menjalankan aturan serta penegakan sanksi saat new normal. Dia mengkritik penegakan aturan selama dua bulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta tidak tegas.

"Dia hanya membuat pernyataan sanksi denda sekian, enggak terlalu jalan. Baiknya, kita buat pendekatan yang lebih persuasif humanis. Kemudian penegakan aturan secara tegas juga, bila dilanggar perlu ditegakkan," tutur Jhonny.



Seperti pakai masker, physical distancing, cuci tangan, dan hindari kerumunan kalau tidak penting.

Jhonny Simanjuntak
Anggota Komisi E DPRD DKI

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di tingkat RT/RW. Lebih dari 60 RW yang dinyatakan zona merah penularan virus korona bakal dijaga ketat. Caranya dengan mewajibkan warga menggunakan surat keluar masuk di tingkat RT/RW. Serta memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut ada 62 RW di DKI

Jakarta yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) guna menekan penyebaran pandemi virus Corona.

Seluruh ketua RW tersebut telah dikumpulkan pada Senin (1/6/2020) untuk sosialisasi. Mereka mendengarkan arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. RW tersebut di sejumlah kelurahan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. (dni)